



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG PENGADILAN PAJAK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN
AHLI/SAKSI PEMOHON
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 28 NOVEMBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak [Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

PT Autoliv Indonesia

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli/Saksi Pemohon (IV)

**Selasa, 28 November 2017, Pukul 14.05 – 14.26 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Aswanto | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Syawaludin
2. Andriansyah Tiawarman
3. Soesanto
4. Ismantoro Sardiono
5. Deny Wahyudi

B. Saksi dari Pemohon:

1. Marsal
2. Bayu Suseno

C. Pemerintah:

1. Erwin Fauzi
2. Didik Hariyanto

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.05 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 78/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan memperkenalkan diri, siapa saja yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Kami dari LKBH Ummi sebagai Pemohon pada PUU Nomor 78/PUU-XV/2017 ini, akan memperkenalkan tim kami. Saya Syawaludin. Kemudian di sebelah kanan saya, Andriansyah. Sebelah paling pojok, Deny Wahyudi. Sebelah kiri saya, Pak Soesanto. Sebelah kiri saya, Ismantoro.

Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dari DPR berhalangan. Dari Kuasa Presiden, silakan.

4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir dari Kementerian Hukum dan HAM. Saya sendiri Erwin Fauzi, kemudian Bapak Didik Hariyanto dari Kementerian Keuangan.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan hari ini sebenarnya mendengar keterangan ahli dan saksi. Tetapi yang terdaftar di sini, hanya saksi sebanyak 2 orang, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Betul, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Baik.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Sebelumnya kami memohon permohonan maaf karena Saksi Ahli yang kami rencanakan hadir, berhalangan hadir karena harus di luar negeri, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kalau mau di ... tetap diajukan, nanti bisa keterangan tertulis saja, ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik, Pak Marsal dan Pak Bayu Suseno dipersilakan ke depan untuk diambil sumpah dulu.

Mohon, Yang Mulia Pak Wahiduddin, untuk memandu.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk kedua Saksi, ya. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

13. SAKSI BERAGAMA ISLAM:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, silakan duduk. Pemohon, siapa terlebih dahulu?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Terima kasih, Yang Mulia.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Pak Marsal?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Pertama, Pak Marsal.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Pak Marsal. Langsung ke podium, ya. Mau dipandu atau langsung memberikan keterangan?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Dipandu, Yang Mulia.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Baik, terima kasih.

Kepada Saudara Saksi Pak Marsal, bisa dijelaskan proses penerimaan surat dari PT Pos Indonesia, itu kapan dan berupa apa yang diterima oleh Bapak sebagai penerima dari PT Autoliv? Terima kasih.

22. SAKSI DARI PEMOHON: MARSAL

Baik, proses penerimaan di PT Autoliv, petugas Pos datang, kemudian kami menerima dan menandatangani bukti penerimaan. Biasanya itu dia satu penerimaan ... satu bukti penerima dari beberapa surat. Kemudian, langsung kami distribusikan ke bagian finance pada saat itu juga atau tidak selang ... tidak lama. Demikian, Pak.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Bisa diinformasikan tanggal berapa dan jam berapa penerimaan surat tersebut?

24. SAKSI DARI PEMOHON: MARSAL

Baik, itu di tanggal 14 Maret 2017, jam 17.35 lebihlah.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Jadi kami luruskan, sesuai penerimaan dari kantor Pos itu adalah 14 Maret 2017, pukul 17.40.23, apakah itu betul?

26. SAKSI DARI PEMOHON: MARSAL

Jam 17?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

40?

28. SAKSI DARI PEMOHON: MARSAL

Ya, 40-an lah.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Baik, cukup, Yang Mulia.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, ya, silakan duduk dulu. Ya, Saksi berikutnya, silakan. Pak Bayu Suseno, bisa sebelah kiri. Ya, sama. Dipandu atau langsung?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Kami pandu, Yang Mulia.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Baik, terima kasih.

Kepada Saksi Pak Bayu Suseno. Bisa dijelaskan, pertama alasan pengajuan banding, terus bagaimana perbedaan antara nilai banding yang diharapkan oleh PT Autoliv dengan yang disetujui oleh pihak DJP? Terakhir kemudian, bagaimana proses banding di pengadilan pajak tersebut? Terima kasih.

34. SAKSI DARI PEMOHON: BAYU SUSENO

Oke, terima kasih sebelumnya atas waktunya kepada kami. Dengan adanya ini, saya mewakili Autoliv Indonesia, kami merasa dirugikan karena kami ... dari ... dari pembukuan 2013 yang kami setuju adalah sekitar Rp2.843.565.981,00. Dengan adanya ini, kami jadi tidak punya ... waktunya jadi lebih ... lebih ... lebih panjang, ya. Yang seharusnya kami bisa proses di ... di sidang sebelumnya ... di proses yang sebelumnya, maksud saya.

Mungkin ada lagi, Pak?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Ya, lebih dijelaskan. Jadi, yang Rp2,8 miliar tersebut, itu adalah angka yang diharapkan lebih bayar dari pihak Autoliv atau Liv? Yang disetujui oleh pihak DJP itu, berapa angkanya?

36. SAKSI DARI PEMOHON: BAYU SUSENO

Oke. Jumlah lebih bayar yang disetujui oleh DJP adalah Rp1.584.487.731,00. Kemudian, yang disetujui oleh Autoliv Indonesia adalah Rp2.843.565.981,00.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Oke, baik. Jadi, ada selisih Rp1,3 miliar, itu yang coba PT Autoliv mau diajukan banding di pengadilan pajak?

38. SAKSI DARI PEMOHON: BAYU SUSENO

Ya, benar.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Oke. Kemudian, terakhir bisa diinformasikan. Apa putusan dari pengadilan pajak tersebut?

40. SAKSI DARI PEMOHON: BAYU SUSENO

Ditolak.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Kenapa ditolak?

42. SAKSI DARI PEMOHON: BAYU SUSENO

Yang sampai saat ini maju itu sekarang. Karena ada perbedaan ... maksudnya, yang ... yang sampai sekarang ini di sini. Karena ada perbedaan interpretasi dari jangka waktu penerimaan di Autoliv Indonesia dengan tanggal dikirimnya dari pihak kantor pajak kepada Pos Indonesia.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Bisa diinformasikan, diterima tanggal berapa oleh PT Autoliv? Sementara, suratnya tanggal berapa diterima oleh kantor Pos?

44. SAKSI DARI PEMOHON: BAYU SUSENO

Diterima Autoliv 14 Maret.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

2017?

46. SAKSI DARI PEMOHON: BAYU SUSENO

Ya, 2017.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Sementara, suratnya sendiri diterima oleh kantor Pos atau tercatatnya?

48. SAKSI DARI PEMOHON: BAYU SUSENO

Diterima oleh Pos Indonesia ... saya lupa yang diterima apa saja (...)

49. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Mungkin (...)

50. SAKSI DARI PEMOHON: BAYU SUSENO

Kami selaku yang penerima surat di Autoliv.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Oke. Kalau di ... informasi di kantor Pos pada tanggal 9 Maret 2014?

Oke, baik, cukup. Terima kasih, Yang Mulia.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

53. SAKSI DARI PEMOHON: BAYU SUSENO

Oke, terima kasih atas waktunya.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan duduk dulu. Dari Kuasa Presiden, ada yang ingin ditanyakan atau cukup? Cukup?

55. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Cukup, Yang Mulia.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih. Dari meja Hakim? Ya, ada satu dari Yang Mulia Pak Suhartoyo.

57. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sedikit, Pak. Saksi yang Pak Bayu, ya. Anda memang yang mendapat kuasa untuk mengurus pajak itu?

58. SAKSI DARI PEMOHON: BAYU SUSENO

Ya, saya selaku dari divisi finance di PT Autoliv Indonesia.

59. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang mengurus pajak secara langsung Anda ... Saudara?

60. SAKSI DARI PEMOHON: BAYU SUSENO

Pada waktu itu 2013, saya successor-nya, saya join di 2015.

61. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh.

62. SAKSI DARI PEMOHON: BAYU SUSENO

Ya, saya hanya menindaklanjuti dari proses yang sebelumnya.

63. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Coba diingat-ingat, ya. Putusan pengadilan banding pajak itu, apakah karena ... karena sudah terlambat itu, terlambat apanya? Mengajukan permohonan bandingnya atautkah ada formalitas lain yang tidak terpenuhi?

64. SAKSI DARI PEMOHON: BAYU SUSENO

Setahu saya, tidak ada, Yang Mulia. Hanya masalah (...)

65. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa?

66. SAKSI DARI PEMOHON: BAYU SUSENO

Jangka waktu penerimaan ... kita ... kita terima di tanggal 14 Maret (...)

67. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

14 Maret? Terus?

68. SAKSI DARI PEMOHON: BAYU SUSENO

Ya.

69. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Masih ada tenggang waktu berapa hari setelah 14 Maret itu untuk mengajukan banding itu?

70. SAKSI DARI PEMOHON: BAYU SUSENO

14 hari.

71. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

14 hari?

72. SAKSI DARI PEMOHON: BAYU SUSENO

Ya.

73. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Padahal, undang-undangnya berapa ... berapa bulan?

74. SAKSI DARI PEMOHON: BAYU SUSENO

Undang-undangnya?

75. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ho oh ... aturannya.

76. SAKSI DARI PEMOHON: BAYU SUSENO

Maaf, saya kurang ... kurang mengerti untuk aturannya yang itu ... untuk soal itu.

77. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, 14 hari itu pun enggak cukup, ya? Kemudian untuk memproses permohonan banding yang Saudara urus dari pihak finance perusahaan Anda itu?

78. SAKSI DARI PEMOHON: BAYU SUSENO

Saya kira, waktu itu terpenuhi.

79. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terpenuhi?

80. SAKSI DARI PEMOHON: BAYU SUSENO

Ya.

81. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Lah, kalau terpenuhi, apa yang jadi alasan pengadilan banding telah lewat waktu itu?

82. SAKSI DARI PEMOHON: BAYU SUSENO

Ya, tadi yang saya sampaikan. Adanya perbedaan ... apa nama ... interpretasi dari kami selaku ... apa namanya ... wajib pajak dengan yang ada di undang-undang.

83. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, itu kan sebenarnya lama kalau yang ada di undang-undang. Sehingga akhirnya Anda tinggal dapat 14 hari itu, kenapa? Gitu lho. Apakah pemberitahuannya yang terlambat dari pihak pengirim atau ... Anda kok kayak enggak menguasai gitu, Anda yang mengalami?

84. SAKSI DARI PEMOHON: BAYU SUSENO

Terus terang, yang untuk proses 2013 ini memang PIC sebelumnya.

85. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Putusan pengadilan bandingnya apa? Tidak dapat diterima atau ditolak?

86. SAKSI DARI PEMOHON: BAYU SUSENO

Putusan yang ... yang ini ... sekarang ini?

87. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, yang Saudara alami sudah lewat itu?

88. SAKSI DARI PEMOHON: BAYU SUSENO

Ditolak.

89. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ditolak. Kalau ditolak, itu bukan masalah formalitas waktu, pasti karena substansi.

Dilampirkan, enggak, Pak Pemohon, itu putusan? Ha?

90. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Dilampirkan, Yang Mulia.

91. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa masih ingat Saudara apa diktum amarnya apa? Dinyatakan tidak dapat diterima apa ditolak?

92. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Alamat tidak dapat diterima, Yang Mulia.

93. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, bukan ditolak.

94. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Oke, maaf, Yang Mulia.

95. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau itu sinkron dengan ... tapi itu juga apakah formalitas waktu semata atau yang lain. Tapi nanti Mahkamah atau hakim akan melihat itu.

96. SAKSI DARI PEMOHON: BAYU SUSENO

Terima kasih.

97. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup, Pak Ketua.

98. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, yang (...)

99. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ini ada sebelah kanan dulu. Prof. Aswanto.

100. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ya, terima kasih.

Saudara Pemohon, ini kan Saudara membawa Saksi ini untuk memberi keterangan kaitannya dengan frasa yang Saudara persoalkan. Frasa yang Saudara persoalkan itu kan, sebenarnya adalah soal tanggal pengiriman dianggap sama dengan tanggal penerimaan, ya, tanggal stempel Pos pengiriman, itu dianggap sama dengan tanggal penerimaan. Kan itu yang Saudara minta untuk diuji, kan?

101. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Mohon izin menjelaskan, Yang Mulia.

102. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Enggak, sudah jelas, sudah jelas. Kan itu yang Saudara ... nah, lalu kemudian kasus konkret yang Saudara ... apa namanya ... tanyakan tadi ke Saksi, ini saya minta kejelasan lagi ke Saksi.

Saudara Saksi, di kantor bagian penerima surat? Betul?

103. SAKSI DARI PEMOHON: MARSAL

Benar, Yang Mulia.

104. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Betul. Nah, kaitannya dengan surat yang dipersoalkan ini, itu menurut Saudara, Saudara terima tanggal 14 Maret?

105. SAKSI DARI PEMOHON: MARSAL

14 Maret, Yang Mulia.

106. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Tahun?

107. SAKSI DARI PEMOHON: MARSAL

2017.

108. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

2017, lalu cap stempel Posnya tanggal berapa?

109. SAKSI DARI PEMOHON: MARSAL

Saya tidak memerhatikan, Yang Mulia.

110. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Bukan 9 Maret?

111. SAKSI DARI PEMOHON: MARSAL

Kurang tahu saya. Saya tidak memerhatikan, Yang Mulia.

112. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Nah, Saudara Pemohon, ini kan tanggal penerimaan itu 14 Maret, tentu beda dengan tanggal pengiriman, kan?

113. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Betul, Yang Mulia.

114. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Tanggal pengiriman berapa?

115. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Sesuai dengan dengan PT Pos tanggal 9 Maret.

116. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

2017 juga?

117. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

2017.

118. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Lah ya, itu kan bedanya cuma beberapa hari kan, cuma 5 hari saja bedanya. Sementara di Pasal 35, ini kan Saudara kaitkan dengan norma yang ada di Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 itu, itu kan tenggang waktunya 3 bulan?

119. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Betul, Yang Mulia. Jadi, sesuai tenggang waktu tersebut, kalau definisi tanggal diterima adalah tanggal diterima oleh wajib pajak, maka batas akhir permohonan banding adalah tanggal 14 ... 14 Juni 2017.

120. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

He em.

121. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Sementara kami mengirimkan permohonan banding tanggal 12 Juni 2017.

122. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ya, itu kan sebenarnya soal implementasi. Karena kalau soal selisih antara dikirim dengan diterima, itu kan cuma 5 hari bedanya. Itu yang Saudara persoalkan, ya?

123. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Betul, Yang Mulia.

124. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Saya ingin memastikan saja bahwa memang ada perbedaan antara hari pengiriman berdasarkan stempel Pos dengan hari penerimaan di kantor, ya, selisihnya 5 hari, ya?

125. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Betul, Yang Mulia.

126. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Dalam kasus konkretnya. Baik, terima kasih, Yang Mulia.

127. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Yang Mulia.

128. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Ketua Yang Mulia.

Ini pertanyaan kepada Bayu. Dalam batas penalaran yang wajar, taruhlah itu kan ada selisih 5 hari, ya, antara tanggal 9 stempel dengan diterima itu tanggal 14, 5 hari. Lalu menurut Pasal 35 itu, 3 bulan waktunya untuk mengajukan itu kan. 3 bulan itu kan 90 hari itu maksudnya. Dalam batas penalaran yang wajar, enggak bisa Anda menyelesaikan definance itu 85 hari untuk soal-soal yang begini?

129. SAKSI DARI PEMOHON: BAYU SUSENO

Dengan kondisi yang 2013, terus terang saya tidak tahu pasti. Yang pasti, kita mengoptimalkan waktu yang ada biasanya, Yang Mulia.

130. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Dengan kondisi, jangan bayangkan 2013. Dengan kondisi sekarang?

131. SAKSI DARI PEMOHON: BAYU SUSENO

Bisa.

132. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bisa? Berarti kan harinya lebih dari cukup kan, sebetulnya untuk apa ... untuk memenuhi ... apa ... menjawab atau mengajukan banding itu?

133. SAKSI DARI PEMOHON: BAYU SUSENO

Benar.

134. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Terima kasih.

135. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Pemohon, apa masih mengajukan ahli, atau saksi, atau cukup?

136. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Cukup, Yang Mulia.

137. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

138. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Maaf, Yang Mulia. Bisa mengajukan ke Pemerintah, enggak, Yang Mulia? Di sini.

139. KETUA: ANWAR USMAN

Ya?

140. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Di sini. Pak Ketua?

141. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, silakan. Prof.

142. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Pemerintah. Kalau misalnya ... apa sih keberatan Pemerintah kalau misalnya menggunakan waktu, sudahlah waktu diterima saja dibandingkan waktu pengiriman? Bagi sisi pemerintahnya kan, lebih pasti waktu pengiriman. Karena begitu dikirim, lalu dianggap 90 hari itu argonya jalan. Tapi bagi wajib pajak kan, yang diterima di mereka yang lebih penting bukan yang dikirimkan.

Nah, apa sih risikonya, kerugiannya kalau digunakan waktu diterima oleh wajib pajak, soal batas waktu banding itu, dibandingkan waktu pengiriman atau stempel Pos itu? Silakan.

143. PEMERINTAH: DIDIK HARIYANTO

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

Jadi, dulu memang ... apa namanya ... kebetulan saya ikut di tim perumusan Undang-Undang Pengadilan Pajak. Jadi pada waktu itu, pembuat undang-undang, khususnya dari Pemerintah ya, sudah memikirkan beberapa opsi, antara lain opsi diterima. Karena kalau di HIR sendiri, hukum acara perdata kan memang diterima. Cuma pada

waktu itu, pengadilan pajak kan baru pertama dibentuk yang hanya ada di ibu kota provinsi ... eh, ibu kota negara yang kebetulan ibu kota provinsi juga.

Nah, sehingga mekanisme yang paling mendekati yang dipikirkan adalah dengan melalui Pos tercatat, bukan Pos prangko. Memang disadari pada waktu itu bahwa tanggal terima itu ... tanggal terima tidak senantiasa sama dengan tanggal kirim, terutama untuk di luar-luar kota.

Nah, untuk itu, tenggang waktunya pun tidak seperti di HIR yang hanya 14 hari, diberikan waktu 3 bulan. Dengan asumsi bahwa ya seandainya pun antara tanggal kirim dan tanggal terima itu ada perbedaan, maka para pihak, baik wajib pajak maupun kantor pajak, masih mempunyai kesempatan yang cukup ... yang cukup. Karena kalau misalnya melalui juru sita dititipkan ke pengadilan negeri, juga tidak mungkin. Karena kan domainnya berbeda. Kalau dititipkan ke kantor pajak, juga tidak mungkin karena dia pihak ... karena dia pihak.

Nah, memang ini kondisi yang menurut pembuat undang-undang pada waktu itu, ya paling ideal kira-kira begitu, Yang Mulia. Terima kasih.

144. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Kuasa Presiden, apa mengajukan ahli, atau saksi, atau sudah cukup?

145. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Untuk ahli dari Pemerintah dua, Yang Mulia.

146. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, baik. Kalau begitu, tadi dari Pemohon sudah cukup, ya.

Sidang ditunda hari Senin tanggal 11 Desember 2017, jam 11.00 WIB untuk mendengar keterangan dari DPR dan dua ahli dari Pemerintah atau Kuasa Presiden.

Ya, terima kasih, ya Saksi. Makalah jangan lupa dua hari sebelum hari sidang, paling lambat itu.

Sudah jelas, ya? Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.26 WIB

Jakarta, 28 November 2017

Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari

NIP. 19820529 200604 2 004